



**PEMERINTAH
KABUPATEN
MOROWALI
UTARA**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022

**Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah**

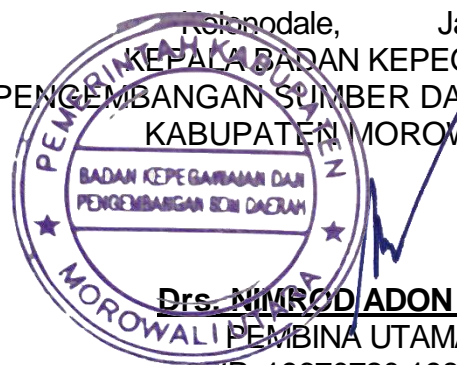
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 ini dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) serta mengacu pada pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memuat tentang perbandingan antara perencanaan dan hasil selama 1 (satu) tahun yang diuraikan dalam pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai. Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas kinerja BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara selama Tahun 2022 yang tertuang dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Semoga Laporan Kinerja BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 ini dapat berguna untuk peningkatan kinerja organisasi melalui langkah-langkah perbaikan pelayanan bagi seluruh stakeholder BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara.

Kotabondale, Januari 2023
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,



Drs. NIMROD ADON TANDI, M.Si.

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670720 198703 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja dari masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah. Adapun bentuk pertanggungjawaban berupa pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dilaksanakan selama kurun tahun anggaran 2022 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 berisi pengukuran kinerja sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 yang dimulai dari proses penyelarasan visi-misi RPJMD Tahun 2021-2026, penetapan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah sebagaimana yang termuat dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Pengukuran kinerja yang diperoleh menunjukkan tingkat keberhasilan/kegagalan capaian kinerja yang hendak dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam pelaksanaan program dan kegiatannya.

Melalui penyajian LKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak tentang pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 mengacu pada 5 (lima) sasaran dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama serta 2 (dua) program dan 9 (sembilan) kegiatan yang telah ditetapkan melalui Perjanjian

Kinerja dengan hasil capaian sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 : ***Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah*** dengan capaian kinerja 105,10% yang diperoleh melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu :
 - a. “Persentase tingkat capaian kinerja BKPSDMD”, dari target $\geq 92\%$ terealisasi 96,69% dengan tingkat capaian 105,10% (Sangat Tinggi).
2. Sasaran Strategis 2 : ***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian*** dengan capaian kinerja 129,98% yang diperoleh melalui pencapaian 2 (dua) indikator kinerja yaitu :
 - a. “Indeks Kepuasan Masyarakat” dari target 70 terealisasi 78,48 dengan tingkat capaian 112,11% (Sangat Tinggi).
 - b. “Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu” dari target 65% terealisasi 96,10% dengan tingkat capaian 147,85% (Sangat Tinggi)
3. Sasaran Strategis 3 : ***Meningkatnya Pengelolaan Anggaran BKPSDMD*** dengan capaian kinerja 105,99% yang diperoleh melalui pencapaian 2 (dua) indikator kinerja yaitu :
 - a. “Persentase tingkat penyerapan anggaran BKPSDMD” dari target $\geq 85\%$ terealisasi 95,18% dengan tingkat capaian 111,98% (Sangat Tinggi).
 - b. “Pengelolaan Anggaran BKPSDMD bebas temuan BPK” dari target 0 temuan terealisasi 0 temuan dengan tingkat capaian 100,00% (Sangat Tinggi).
4. Sasaran Strategis 4 : ***Meningkatnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara*** dengan capaian kinerja 101,83% yang diperoleh melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu :
 - a. “Indeks Profesionalitas ASN meningkat dibanding tahun sebelumnya” dari target 40 terealisasi 40,73 dengan tingkat capaian 101,83% (Sangat Tinggi).
5. Sasaran Strategis 5 : ***Meningkatnya Rasio Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara*** dengan capaian kinerja 111,66% yang diperoleh melalui pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :
 - a. “Rasio pegawai Perguruan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga)” dari target 210% terealisasi 249,31% dengan tingkat capaian 118,72% (Sangat Tinggi).
 - b. “Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)” dari target 15% terealisasi 16,75%. Dengan tingkat capaian 111,67% (Sangat

Tinggi).

- a. “Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)” dari target 35% terealisasi 36,61% dengan tingkat capaian 104,60% (Sangat Tinggi).

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, dan efisien. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Penyusunan LKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara dilakukan di setiap akhir tahun anggaran guna mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi yang dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam kurun waktu satu tahun anggaran. LKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang termuat dalam dokumen Rencana Strategis 2021-2026 Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara selalu berkomitmen untuk melaksanakan perubahan paradigma dalam pengelolaan strategi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas aparatur.

Sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai visi misi kepala daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara tentunya berkewajiban untuk menyusun laporan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepadanya. Terlebih lagi dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan laporan kinerja yang disusun dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sehingga pada akhirnya Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat dipergunakan sebagai perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
12. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Struktur Organisasi Badan Daerah;
21. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
22. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026;

C. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja ini disusun dengan maksud untuk memenuhi ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Morowali Utara pada khususnya.

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara disusun dengan tujuan:

- a. Sebagai sarana bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati Morowali Utara;
- b. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai upaya untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

D. Aspek Strategis Organisasi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, penyelenggaraan pelayanan manajemen di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 12 tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara, membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

Berdasarkan telaah visi misi RPJMD 2021-2026 Kabupaten Morowali Utara sebagaimana diuraikan sebelumnya, BKPSDMD mengintervensi sasaran strategis "***Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif***" yang selanjutnya ditetapkan sebagai tujuan dari BKPSDMD dan tercantum di dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026 BKPSDMD. Hal ini sangat selaras dengan salah satu sasaran **Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil**

Negara dan Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu terwujudnya ASN yang kompeten. Begitu pun dengan **Badan Kepegawaian Negara (BKN)** yang memiliki peran sangat strategis di dalam pengelolaan manajemen ASN yang dituangkan dalam sasaran strategis BKN 2020-2024 yaitu : 1) SS.1 Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN, 2) SS.2 Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima, 3) SS.3 Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN, 4) SS.4 Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem informasi ASN, 5) SS.5 Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN, 6) SS.6 Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN. Sementara itu, keselarasan dengan **Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)** terdapat pada sasaran strategis ke-1 yaitu ***“Terwujudnya Institusi pembelajar berkelas dunia melalui Pengembangan Kompetensi Aparatur, Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara dalam mewujudkan World Class Government”***.

Aspek strategis yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi

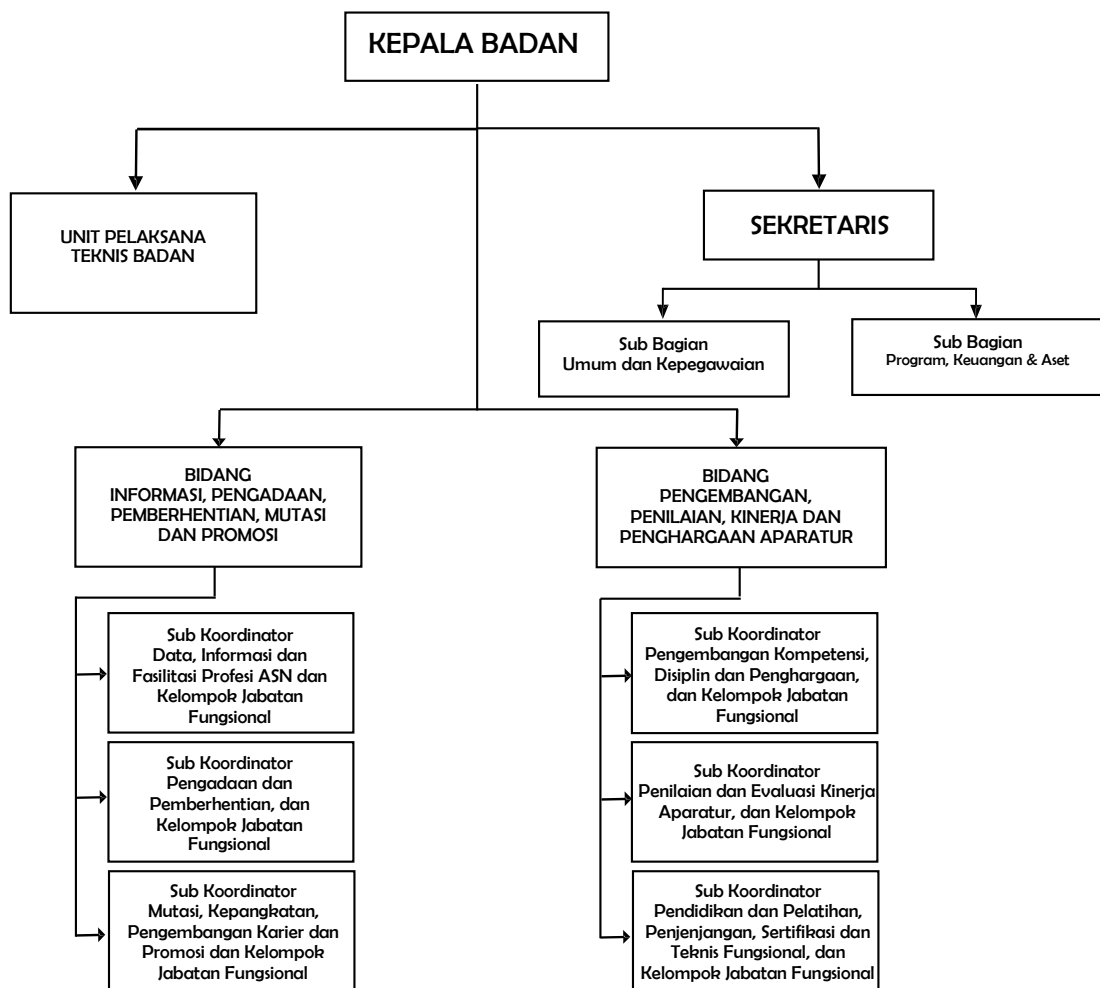
Sesuai dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Informasi, Pengadaan, Pemberhentian, Mutasi dan Promosi membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;

- d. Bidang Pengembangan, Penilaian, Kinerja dan Penghargaan Aparatur membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Morowali Utara



2. Tugas dan Fungsi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur Morowali Utara Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah

Kabupaten Morowali Utara. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, dan bidang pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- b. Penyelenggaraan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, dan bidang pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, dan bidang pendidikan dan pelatihan;
- d. Penyelenggaraan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Kabupaten di bidang kepegawaian, dan bidang pendidikan dan pelatihan;
- e. Penyelenggaraan administrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- f. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Sumber Daya Manusia

Guna mendukung kinerja dan berjalannya tugas serta fungsi dari organisasi di lingkungan BKPSDMD sangat dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia/Aparatur yang dimiliki. Berdasarkan data pertanggal 31 Desember 2022, BKPSDMD didukung oleh 40 orang ASN dan 7 orang tenaga kontrak dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini:

1. Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.1
Data Pegawai BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara
Berdasarkan Gender Pertanggal 31 Desember 2022

No	Uraian	PNS	CPNS	PPPK	CPPPK	PHL
1	2	3	4	5	6	7
1	Laki-Laki	16	2	0	0	5
2	Perempuan	18	4	0	0	2
JUMLAH		34	6	0	0	7
TOTAL		47				

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2022

2. Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Untuk dapat menyelenggarakan tugas dan fungsinya, BKPSDMD didukung oleh sejumlah pegawai dengan berbagai macam latar belakang pendidikan. Pada Tabel 1.2 berikut, dapat dilihat susunan pegawai BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara berdasarkan kualifikasi pendidikan terakhir :

Tabel 1.2
Data Pegawai BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara
Berdasarkan Pendidikan Terakhir Pertanggal 31 Desember 2022

No.	Pendidikan Terakhir	PNS	CPNS	PPPK	CPPPK	PHL
1	2	3	4	5	6	7
1	S3	-	-	-	-	-
2	S2	2	-	-	-	-
3	S1/DIV	24	6	-	-	6
4	D3	1	-	-	-	-
5	D2	-	-	-	-	-
6	D1	-	-	-	-	-
7	SMU/Sederajat	7	-	-	-	1
8	SMP/Sederajat	-	-	-	-	-
9	SD/Sederajat	-	-	-	-	-
JUMLAH		34	6	0	0	7
TOTAL		47				

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2022

3. Data Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia

Tabel 1.3
Data Pegawai BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara
Berdasarkan Usia Pertanggal 31 Desember 2022

No.	Kelompok Usia (Tahun)	PNS	CPNS	PPPK	CPPPK	PHL
1	2	3	4	5	6	7
1	18 - 20	-	-	-	-	-
2	21 - 30	-	3	-	-	3
3	31 - 40	19	3	-	-	3
4	41 - 50	9	-	-	-	1
5	51 - 60	6	-	-	-	-
6	≥ 61	-	-	-	-	-
JUMLAH		34	6	0	0	7
TOTAL		47				

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2022

4. Susunan Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Jenjang kepangkatan dan golongan pegawai pada BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut :

Tabel 1.4
Data Pegawai BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara
Berdasarkan Pangkat dan Golongan Pertanggal 31 Desember 2022

No.	Pangkat dan Golongan	PNS	CPNS	PPPK	CPPPK	PHL
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembina Utama Muda, IV/c	1				
2	Pembina Tk. I, IV/b	1				
3	Pembina, IV/a	1				
4	Penata Tkt.I, III/d	6				
5	Penata, III/c	3				
6	Penata Muda Tk. I, III/b	1				
7	Penata Muda, III/a	13	6			
8	Pengatur Tkt.I, II/d	5				
9	Pengatur, II/c	2				
10	Pengatur Muda Tkt.1, II/b	1				
11	Pengatur Muda, II/a	0				
13	PHL					7
JUMLAH		34	6	0	0	7
TOTAL		47				

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2022

5. Susunan Pegawai Berdasarkan Jabatan ASN

Susunan pegawai BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara berdasarkan jabatan ASN dapat dilihat pada Tabel 1.5 berikut :

Tabel 1.5
Susunan Pegawai Berdasarkan Jabatan ASN Pertanggal 31 Desember 2022

No	Menurut Jabatan	Status					Jumlah
		PNS	CPNS	PPPK	CPPPK	PHL	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jabatan Pimpinan Tinggi						
a	Jabatan Pimpinan Tinggi Utama	-	-	-	-	-	0
b	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	-	-	-	-	-	0
c	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	-	-	-	-	1
2	Fungsional						
a	Fungsional Keahlian :						
	1) ahli utama	-	-	-	-	-	0
	2) ahli madya	-	-	-	-	-	0
	3) ahli muda	6	-	-	-	-	6
	4) ahli pertama	1	2	-	-	-	3
b	Fungsional Keterampilan :						
	1) penyelia	-	-	-	-	-	0
	2) mahir	-	-	-	-	-	0
	3) terampil	-	-	-	-	-	0
	4) pemula	-	-	-	-	-	0
3	Jabatan Administrasi						
a	Administrator	3	-	-	-	-	3
b	Pengawas	2	-	-	-	-	2
c	Pelaksana	21	4	-	-	7	32
JUMLAH		34	6	0	0	7	47
TOTAL PEGAWAI		47					

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2022

F. Sarana dan Prasarana

Di samping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan dapat didayagunakan dalam peningkatan pendapatan daerah. Saat ini kantor BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara menempati ruangan di Kompleks Perkantoran Kantor Bupati (Sayap Kanan Gedung Kantor Bupati Morowali Utara) yang terletak di Jalan Bumi Nangka,

Kolonodale, Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos 94971, alamat email : bkpsdmdmorowaliutara@gmail.com, website di <http://bkpsdm.morowaliutarakab.go.id>, akun Facebook Bkpsdmd Morowali Utara, dan akun Instagram @bkpsdmd_morut.

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, BKPSDMD mendapat dukungan sumber daya lainnya yaitu aset/modal berupa sarana dan prasarana yang dapat dilihat pada Tabel 1.6 berikut ini:

Tabel 1.6
Sarana dan Prasarana BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara
Pertanggal 31 Desember 2022

No.	Jenis Sarana/Prasarana		Jumlah	Kondisi		Keterangan
				Baik	Rusak	
1	2		3	4	5	6
A	Tanah					
1	1	Tanah Bangunan Tempat Kerja lainnya	37.510 m2	37.510 m2	-	Tanah Lokasi Balai Latihan Kerja Desa Tompira
2	2	Tanah Bangunan Tempat Kerja lainnya	21.300 m2	21.300 m2	-	Tanah Bangunan Diklat Desa Tompira
B	Peralatan & Mesin					
1	1	Mini Bus	1	1	-	
2	2	Sepeda Motor	7	7	-	
3	3	Meja Bundar	24	24	-	
4	4	Kursi Putar	42	42	-	
5	5	Kursi Lipat	170	170	-	
6	6	Meja Biro	12	12	-	
7	7	Komputer PC	11	11	-	
8	8	Laptop	22	17	5	
9	9	Printer	13	10	3	
10	10	Meja Kerja	46	46	-	
11	11	Kursi Pejabat Eselon IV	11	11	-	
12	12	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	10	10	-	
13	13	Proyektor + Attachment	8	4	4	
14	14	Lemari Besi	10	10	-	
15	15	Papan tulis	7	7	-	
16	16	White Board	2	2	-	
17	17	Bantal	68 +70	68 +70	-	
18	18	Seprei	50 + 94	50 + 94	-	
19	19	Tempat Tidur Busa (Springbed)	61+25	61+25	-	
20	20	Gordyn	33	33	-	
21	21	Mesin Potong Rumput	2	1	1	
22	22	AC Split	10	10	-	
23	23	Dispenser	3	2	1	
24	24	Sound System	3	2	1	
25	25	Microphone	2	2	-	
26	26	Mic Conference	1	1	-	
27	27	Tiang Bendera	2	2	-	
28	28	Kaca hias	1	1	-	
29	29	Mimbar/Podium	1	1	-	

	30	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	196	-	196	
	31	Lampu Hias	19	19	-	
	32	Stabilizer/Stavolt	1	1	-	
	33	Modem	2	1	1	
	34	Peralatan Studio Visual Lain-lain	16			
	35	Peralatan Antena SHF/Parabola Lain-lain	1	1	-	
	36	Mixer	2	2	-	
	37	TV Monitor	1			
	38	Saklar	10	10	-	
	39	Piting	14	14	-	
	40	Lambang Negara (Garuda)	1	1	-	
	41	Receiver	2	2	-	
	42	Mesin Absen (Time Recorder)	25	-	25	
	43	Genset	2	2	-	
	44	Meja Makan	9	6	3	
	45	Kursi Tamu	6	2	4	
	46	Karpet	1	1	-	
	47	Jam Mekanis	6	6	-	
	48	Kipas Angin	24	24	-	
	49	Televisi	4	3	1	
	50	Loudspeaker	2	2	-	
	51	Megaphone	1	1	-	
	52	Seterika	1	-	1	
	53	Flashdisk	1	-	2	
	54	Camera Electronic	1	1	-	
	55	Amplifier	1	1	-	
	56	Organ/Electone	1	1	-	
	57	Lemari Kayu	2	2	-	
	58	Papan Pengumuman	2	2	-	
	59	Mesin Absensi	36	36	-	
	60	Kursi Besi/Metal	50	50	-	
	61	Rak Jemuran	30	5	25	
	62	Server	1			
	63	Peralatan Jaringan Lain-lain	10			
	64	Brand Kas	1	1	-	
	65	Guling	10	10	-	
	66	Scanner	1	1	-	
	67	Filling Besi/Metal	4	4	-	
	68	Kursi Kerja	22	22	-	
	69	Meja Rapat	2	2	-	
	70	Uninterruptible Power Supply (UPS)	5	5	-	
C	Gedung & Bangunan					
	1	Bangunan Gedung Kantor Permanen 0001	1	Baik		Pembangunan Selasar Kantor Diklat Kec. Petasia Timur
	2	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain 0001	16 m2	Baik		Pembangunan Tempat Wudhu Musholla Diklat Kec. Petasia Timur
	3	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen 0001	144 m2	Baik		Pembangunan Tempat Parkir Gedung Diklat Kec. Petasia Timur

	4	Konstruksi Pagar 0001	600 m2	Baik		Pembangunan Pagar Duri pada kantor Diklat Kec. Petasia Timur
	5	Konstruksi Pagar 0002		Baik		Pembangunan Pagar Beton Kantor Diklat
	6	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen 0001	81 m2	Baik		Mushollah (Hibah dari Pemda Morowali)
	7	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain 001	48 m2	Baik		Pembangunan Kamar Widyaiswara Gedung Diklat Desa Bungintimbe Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara (L: 6 M x P: 8 M)
	8	Bangunan Kamar Mandi 001	3 m2	Baik		Pembangunan WC Ruang Kelas Gedung Diklat Desa Bungintimbe Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara (P: 1 M x P: 3 M)
D	Jalan, Irigasi & Jaringan					
	1	Jalan Khusus Komplek 001	1.492 m2	Baik		Pembangunan Jalan dan Timbunan Tanah ada Kantor Diklat Kec. Petasia Timur, Penyiapan Badan Jalan Luas 480,00 M2, Timbunan Pilihan 120 M2, Timbunan Biasa 891,80 M3
	2	Sumur Gali (SGL) 0001	1	Baik		Pengadaan Pekerjaan Sumur Bor untuk Diklat
	3	Jalan Desa Lain-lain 0001	264 m2	Baik		Pembangunan Jalan Rabat Beton Kantor Diklat (L: 4M x P: 66M)
E	Aset Tetap Lainnya		-		-	-

Sumber : Data BKPSDMD Tahun 2022

G. Jasa Pelayanan BKPSDMD

Pelayanan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara merupakan pelayanan publik dalam bentuk administratif di bidang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara yaitu :

1. Layanan Bidang Informasi, Pengadaan, Pemberhentian, Mutasi dan Promosi

- a. Penyusunan Kebutuhan ASN
- b. Pemberkasan usul penetapan NIP CPNS dan NI PPPK
- c. Penetapan SK Pengangkatan CPNS dan PPPK
- d. Penyampaian SK Pengangkatan CPNS dan PPPK
- e. Usulan Karis/Karsu
- f. Usulan Karpeg

- g. Kartu Peserta Taspen
- h. Pengajuan Cuti ASN
- i. Kenaikan Pangkat
- j. Kenaikan Gaji Berkala
- k. Mutasi Antar Daerah
- l. Pengangkatan CPNS menjadi PNS
- m. Proses Administrasi Pensiun
- n. Informasi Data Statistik dan Biodata Pegawai
- o. Penyajian Peraturan Perundang-undangan bidang kepegawaian
- p. Informasi Kepegawaian melalui media offline dan online
- q. Upacara Persemayaman ASN
- r. Pengelolaan Data dan Informasi Pegawai secara elektronik melalui aplikasi SI-ASN/SAPK
- s. Informasi Kepegawaian melalui konsultasi kebijakan operasional di bidang kepegawaian.
- t. Permohonan surat keterangan terkait dokumen kepegawaian.
- u. Pengesahan dokumen kepegawaian.

2. Layanan Bidang Pengembangan, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur

- a. Pelatihan Dasar (LATSAR)
- b. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)
- c. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN II)
- d. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)
- e. Diklat Teknis dan Fungsional
- f. Tugas Belajar
- g. Bantuan Tugas Belajar
- h. Pelantikan dalam Jabatan Struktural
- i. Pengambilan Sumpah PNS
- j. Seleksi Pengisian JPT Pratama
- k. Uji Kompetensi
- l. Penetapan Pemberhentian Sementara PNS
- m. Penetapan Pengaktifan kembali sebagai PNS
- n. Penilaian Kinerja Pegawai

- o. Rekomendasi TPP
- p. Pengajuan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin
- q. Penetapan Hukuman Disiplin
- r. Permohonan Ijin Perceraian
- s. Usulan Satya Lencana Karya Satya

Jenis layanan yang dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara cukup bervariasi sehingga tidak hanya melibatkan SDM Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara akan tetapi bekerja sama dan melibatkan instansi terkait lainnya antara lain BKN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kantor Regional IV BKN Makassar, UPT BKN Palu, LAN RI, BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah, BKD Provinsi Sulawesi Tengah, serta KASN RI. Kerjasama tersebut dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara agar mendapat pelayanan yang cepat, tepat, akuntabel sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada.

H. Perkembangan Keadaan PNS Kabupaten Morowali Utara

Perkembangan keadaan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara berdasarkan jenis kelamin, usia, golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon berdasarkan data SAPK per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

1. ASN Kabupaten Morowali Utara Menurut Jenis Kelamin

No.	Uraian	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Kabupaten Morowali Utara	1539	2165	3704
Total		1539	2165	3704

Sumber : Data olahan BKPSDMD Kab. Morowali Utara per 02 Januari 2022

2. ASN Kabupaten Morowali Utara Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Fungsional Tertentu			
	Fungsional Tertentu PNS	724	1308	2032
	Fungsional Tertentu PPPK	47	153	200
2	Fungsional Umum (Pelaksana)	551	586	1137
3	Struktural			
	- Eselon I	0	0	0
	- Eselon II	29	1	30
	- Eselon III	102	41	143
	- Eselon IV	86	76	162
	- Eselon V	0	0	0
	Total	1539	2165	3704

Sumber : Data olahan BKPSDMD Kab. Morowali Utara per 02 Januari 2022

3. ASN Kabupaten Morowali Utara Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	SD	2	0	2
2	SMP	5	0	5
3	SMA/SMK	352	264	616
4	D.I	1	26	27
5	D.II	38	49	87
6	D.III	77	297	374
7	S1/D.IV	987	1472	2459
8	S2	77	57	134
9	S3	0	0	0
	Total	1539	2165	3704

Sumber : Data olahan BKPSDMD Kab. Morowali Utara per 02 Januari 2022

4. ASN Kabupaten Morowali Utara Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin

No.	Tingkat Kepangkatan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	I/a	0	0	0
2	I/b	1	0	1
3	I/c	0	0	0
4	I/d	1	0	1
5	II/a	25	15	40

No.	Tingkat Kepangkatan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
6	II/b	44	45	89
7	II/c	101	123	224
8	II/d	128	157	285
9	III/a	373	647	1020
10	III/b	181	320	501
11	III/c	135	210	345
12	III/d	234	297	531
13	IV/a	172	214	386
14	IV/b	124	137	261
15	IV/c	19	0	19
16	IV/d	1	0	1
17	IV/e	0	0	0
Total		1539	2165	3704

Sumber : Data olahan BKPSDMD Kab. Morowali Utara per 02 Januari 2022

5. ASN Kabupaten Morowali Utara Menurut Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara

No.	Uraian	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
I	Sekretariat Daerah	5	2	7
1	Bagian Pemerintahan	4	6	10
2	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	7	2	9
3	Bagian Hukum	4	9	13
4	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	8	3	11
5	Bagian Kesejahteraan Rakyat	4	5	9
6	Bagian Organisasi	3	9	12
7	Bagian Administrasi Pembangunan	2	5	7
8	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	7	0	7
9	Bagian Umum	15	4	19
II.	Sekretariat DPRD	14	12	26
III.	Inspektorat Daerah	24	14	38
IV.	Badan Daerah :			
1	Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)	17	16	33
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	18	27	45
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD)	18	22	40
4	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)	16	14	30
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	16	5	21
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah (Bakesbangpolda)	13	5	18

No.	Uraian	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
V.	Dinas Daerah :			
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah	616	1060	1676
2	Dinas Kesehatan Daerah	14	39	53
	UPT. Puskesmas Dinas Kesehatan :			
	1. Puskesmas Kolonodale	6	45	51
	2. Puskesmas Beteleme	5	53	58
	3. Puskesmas Molino	7	24	31
	4. Puskesmas Mayumba	7	21	28
	5. Puskesmas Petumbea	6	31	37
	6. Puskesmas Lee	7	23	30
	7. Puskesmas Tambayoli	7	19	26
	8. Puskesmas Panca Makmur	8	15	23
	9. Puskesmas Baturube	7	27	34
	10. Puskesmas Pandauke	6	23	29
	11. Puskesmas Wongko Ndaya	4	11	15
	12. Puskesmas Tomata	8	34	42
	13. Puskesmas Anuntoluwu	4	23	27
	14. Puskesmas Potowe Indo	4	9	13
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah (PUPRPKPD)	60	13	73
4	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah	38	11	49
5	Dinas Sosial Daerah	11	12	23
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah	9	11	20
7	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah	14	29	43
8	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	16	10	26
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah	8	21	29
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah	15	8	23
11	Dinas Perhubungan Daerah	23	8	31
12	Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah	17	11	28
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah	9	14	23
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	28	17	45
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	8	6	14
16	Dinas Perikanan Daerah	22	11	33
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah	17	18	35
18	Dinas Pertanian dan Pangan Daerah	91	59	150
VI.	RSUD Kolonodale	62	210	272
VII.	Kecamatan :			
1	Petasia	26	16	42

No.	Uraian	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
2	Petasia Timur	16	8	24
3	Petasia Barat	17	4	21
4	Lembo	16	12	28
5	Lembo Raya	16	2	18
6	Mori Atas	15	11	26
7	Mori Utara	13	8	21
8	Bungku Utara	31	9	40
9	Mamosalato	17	6	23
10	Soyo Jaya	13	3	16
Total		1539	2165	3704

Sumber : Data olahan BKPSDMD Kab. Morowali Utara per 02 Januari 2022

I. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara masih pada rendahnya profesionalitas aparatur. Seluruh sumber daya yang dimiliki dikerahkan untuk mengatasi isu strategis ini. Namun, dalam implementasi program/kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2022, terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai.

BKPSDMD sebagai perangkat daerah yang berfungsi sebagai penyelenggara dalam bidang pendidikan dan pelatihan belum terlaksana dengan optimal. Hal ini masih terhambat disebabkan lembaga pemerintah penyelenggara kediklatan BELUM TERPUSAT dan TIDAK MANDIRI. Tidak adanya koordinasi tentang pengelolaan kegiatan diklat serta tidak adanya lembaga terpusat dan mandiri mengakibatkan kewenangan pelaksanaan fungsi dan anggaran pengembangan kompetensi SDM menjadi terbatas.

2. Kedisiplinan PNS Kabupaten Morowali Utara belum optimal

Banyak upaya untuk mendisiplinkan PNS belum terakomodir sehingga masih membutuhkan pengembangan dan perencanaan yang optimal.

3. Aplikasi kepegawaian belum optimal dan terintegrasi.

Beberapa aplikasi kepegawaian masih belum optimal sehingga administrasi masih banyak menggunakan kertas. Dengan aplikasi kepegawaian yang lebih optimal, diharapkan program paperless dapat mendorong pencapaian

reformasi birokrasi dan penataan arsip. Saat ini juga aplikasi masih bersifat sektoral belum terintegrasi dengan baik. Banyaknya aplikasi yang harus ditangani dan diremajakan berdampak pada besarnya sumber daya (manusia, waktu, anggaran) yang harus dikeluarkan setiap tahun.

4. Belum optimalnya pengelolaan data kepegawaian.

Pengelolaan data kepegawaian masih belum optimal dengan masih adanya data pegawai yang tidak sesuai antara data yang tercatat di SAPK dengan data di lapangan. Ketidaksihesuaian data ini perlu disinkronisasi tetapi masih terkendala pada ketersediaan anggaran, waktu dan sumber daya manusia.

5. Belum optimalnya perencanaan ASN.

Perencanaan ASN belum optimal karena rencana kebutuhan pegawai lima tahunan belum sesuai dengan rencana strategis organisasi; Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan belum berbasis TI; serta belum adanya metode yang jelas dan terstruktur dalam menentukan rencana distribusi pegawai.

6. Belum optimalnya pemberdayaan KORPRI dan pembekalan bagi pegawai yang memasuki masa pensiun.

Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Morowali Utara belum terbentuk dan dikukuhkan sehingga pembinaan KORPRI hampir tidak mendapat peluang dari segi penganggaran. Padahal anggota KORPRI adalah seluruh pegawai pemerintah se-Kabupaten Morowali Utara. Beberapa program/kegiatan pembinaan seperti bakti sosial KORPRI, bimbingan teknis bagi anggota yang memasuki masa pensiun, dan lain-lain masih sangat dibutuhkan.

7. Pegawai baru belum diberi orientasi sehingga pengetahuan dasar ASN terkait lingkungan kerja masih sangat kurang memadai.

8. Belum optimalnya audit atau assesment, perencanaan pengembangan karir, pola karir, promosi dan mutasi ASN.

J. Sistematika Penyajian

Laporan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara disusun dengan sistematika yang tercantum pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan.

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja.

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2022.

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2022;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2022 dengan tahun 2021 dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran.

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup.

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Keselarasan Kinerja BKPSDMD
2. Rencana Aksi Tahun 2022
3. Laporan Realisasi Anggaran BKPSDMD Per 31 Desember 2022
4. Evaluasi terhadap Hasil Pelaksanaan Renja Triwulan IV Tahun 2022
5. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

BAB II PERENCANAAN KINERJA



A. Perencanaan Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 adalah:

"Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera".

Adapun misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, terdapat 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Morowali Utara Periode 2021 – 2026, yaitu:

- 1) Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
- 2) Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
- 3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
- 4) Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
- 5) **Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.**

Berdasarkan telaah visi misi RPJMD 2021-2026 Kabupaten Morowali Utara sebagaimana diuraikan sebelumnya, **Misi ke-lima** yakni "**Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik**" merupakan misi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi BKPSDMD. Berangkat dari misi tersebut, BKPSDMD mengintervensi tujuan kepala daerah yaitu "**meningkatkan kinerja pelayanan publik**" dengan sasaran strategis "**terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif**" yang selanjutnya ditetapkan sebagai **tujuan** dari BKPSDMD.

2. Keselarasan Kinerja

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kab. Morowali Utara Tahun 2021-2026 dengan kinerja Renstra BKPSDMD Tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja BKPSDMD dengan kinerja Kepala Daerah.

Tabel 2.1.

Keselarasn Kinerja Misi-5

Misi 5	Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.		
	Tujuan : Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	
		Sasaran : Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	1. Predikat SAKIP 2. Indeks RB 3. Nilai LPPD 4. Opini BPK

Sumber : Data olahan BKPSDMD Kab. Morowali Utara 2022

3. Tujuan dan Sasaran BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara

Tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi pada langkah sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Untuk periode 2021–2026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara menetapkan tujuan sebagai berikut :

Tujuan : **“Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif”**

Melalui tujuan ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara melakukan upaya-upaya sesuai tugas dan fungsinya untuk menciptakan pemerintahan yang efisien dan efektif. Pencapaian tujuan ini akan diukur dengan **Indikator Tujuan (IT)** sebagai berikut :

IT.1 Persentase Capaian Kinerja BKPSDMD yang merupakan turunan dalam penetapan Predikat SAKIP pemerintah daerah;

IT.2 Jumlah Temuan BPK dalam Laporan Keuangan BKPSDMD yang merupakan bagian dalam penetapan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

IT.3 Persentase Penerapan Sistem Manajemen ASN dalam Reformasi Birokrasi

yang merupakan salah satu indikator dalam penilaian Indeks RB pemerintah daerah; dan

IT.4 Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang merupakan unsur dari penetapan Nilai LPPD pemerintah daerah.

Berdasarkan rumusan tujuan dan indikator kinerja tujuan yang telah ditetapkan ini, maka **Sasaran Strategis (SS)** yang akan dicapai di dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026 BKPSDMD adalah sebagai berikut :

SS.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan

SS.2 Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian, akan mendukung pencapaian **Indikator Tujuan 1**, yaitu **IT.1** Persentase Capaian Kinerja BKPSDMD yang merupakan turunan dalam penetapan Predikat SAKIP pemerintah daerah;

SS.3 Meningkatnya pengelolaan anggaran perangkat daerah akan mendukung pencapaian **Indikator Tujuan 2**, yaitu **IT.2** Jumlah Temuan BPK dalam Laporan Keuangan BKPSDMD yang merupakan bagian dalam penetapan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

SS.4 Meningkatnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara, akan mendukung pencapaian **Indikator Tujuan 3**, yaitu **IT.3** Persentase Penerapan Sistem Manajemen ASN dalam Reformasi Birokrasi yang merupakan salah satu indikator dalam penilaian Indeks RB pemerintah daerah;

SS.5 Meningkatnya rasio pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, akan mendukung pencapaian **Indikator Tujuan 4**, yaitu **IT.4** Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang merupakan unsur dari penetapan Nilai LPPD pemerintah daerah; dan

Masing-masing Sasaran Strategis (SS) juga memiliki indikator kinerja yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara. Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara digambar secara terperinci melalui matriks berikut :

Tabel 2.2.

Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	Satuan	Target Tahun					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
						Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	IT.1 Persentase Capaian Kinerja BKPSDMD (Predikat SAKIP)	SS.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	ISS.1.1 Persentase tingkat capaian kinerja BKPSDMD	Persen	≥90	≥92	≥93	≥94	≥95	≥96
			SS.2 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	ISS.2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Tidak diketahui	70	72	75	77	80
		ISS.2.2 Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu		Persen	Tidak diketahui	65	75	80	85	90	
		IT.2 Jumlah Temuan BPK dalam Laporan Keuangan BKPSDMD (Opini BPK)	SS.3 Meningkatnya pengelolaan anggaran BKPSDMD	ISS.3.1 Persentase tingkat penyerapan anggaran BKPSDMD	Persen	≥80	≥85	≥90	≥95	≥96	≥97
				ISS.3.2 Pengelolaan Anggaran BKPSDMD bebas temuan BPK	Temuan	0	0	0	0	0	0
		IT.3 Persentase Penerapan Sistem Manajemen ASN dalam Reformasi Birokrasi (Indeks RB)	SS.4 Meningkatnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara	ISS.4.1 Indeks Profesionalitas ASN meningkat dibanding tahun sebelumnya	Nilai	30	40	45	50	55	60

		<p>IT.4 Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dengan bobot 20% (Nilai LPPD)</p>	<p>SS.5 Meningkatnya rasio pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara</p>	<p>ISS.5.1 Rasio pegawai Perguruan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)</p>	Persen	200	210	220	230	240	250
				<p>ISS.5.2 Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)</p>	Persen	5	15	16	17	18	19
				<p>ISS.5.3 Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)</p>	Persen	90	35	40	80	85	95

Sumber : Data olahan BKPSDMD Kab. Morowali Utara 2022

4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

BKPSDMD telah menetapkan IKU melalui Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor _____ tentang Indikator Kinerja Utama BKPSDMD Tahun 2022-2026. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDMD adalah sbb :

Tabel 2.3.
Indikator Kinerja Utama
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2022-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	PARAMETER/RUMUS IKU	SUMBER DATA	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	IT.1 Persentase Capaian Kinerja BKPSDMD (Predikat SAKIP)	SS.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	ISS.1.1 Persentase tingkat capaian kinerja BKPSDMD	$\frac{\text{Capaian Kinerja Tahun } n}{\text{Capaian Kinerja Tahun } n - 1} \times 100\%$	Evaluasi Renja TW IV BKPSDMD	
				SS.2 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	ISS.2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat	Survey Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat BKPSDMD Kab. Morowali Utara
					ISS.2.2 Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dibagi Keseluruhan administrasi kepegawaian yang diterima dikali 100%	Data olahan sub bagian program, keuangan dan aset BKPSDMD Kab. Morowali Utara
		IT.2 Jumlah Temuan BPK dalam Laporan Keuangan BKPSDMD (Opini BPK)	SS.3 Meningkatnya pengelolaan anggaran BKPSDMD	ISS.3.1 Persentase tingkat penyerapan anggaran BKPSDMD	Jumlah realisasi anggaran dibagi Total Pagu Anggaran dikali 100%	Evaluasi Renja TW IV BKPSDMD dan Laporan Realisasi Anggaran BKPSDMD	
				ISS.3.2 Pengelolaan Anggaran BKPSDMD bebas temuan BPK	Jumlah Temuan BPK saat Pemeriksaan Laporan Keuangan BKPSDMD	BPK RI	

		IT.3 Persentase Penerapan Sistem Manajemen ASN dalam Reformasi Birokrasi (Indeks RB)	SS.4 Meningkatnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara	ISS.4.1 Indeks Profesionalitas ASN meningkat dibanding tahun sebelumnya	Jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi. Adapun dimensi yang dimaksud, antara lain : 1. Dimensi Kualifikasi; 2. Dimensi Kompetensi; 3. Dimensi Kinerja; dan 4. Dimensi Disiplin.	BKN RI
		IT.4 Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dengan bobot 20% (Nilai LPPD)	SS.5 Meningkatnya rasio pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	ISS.5.1 Rasio pegawai Perguruan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	(Jumlah pegawai menurut Pendidikan PT ke atas(tidak termasuk Guru dan tenaga kesehatan))/(Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)) X 100%	Data olahan sub bagian program, keuangan dan aset BKPSDMD Kab. Morowali Utara untuk LPPD
	ISS.5.2 Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			(Jumlah pegawai Fungsional di luar Guru dan Tenaga Kesehatan)/(Seluruh Jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) X 100%	Data olahan sub bagian program, keuangan dan aset BKPSDMD Kab. Morowali Utara untuk LPPD	
	ISS.5.3 Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			(Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi(PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)) / (Seluruh Jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)) X 100%	Data olahan sub bagian program, keuangan dan aset BKPSDMD Kab. Morowali Utara untuk LPPD	

Sumber : Data olahan BKPSDMD Kab. Morowali Utara 2022

5. Cascading Kinerja

Dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja pembangunan daerah di bidang profesionalitas ASN, maka BKPSDMD menyusun cascading kinerja. Cascading tersebut tersusun dalam keselarasan kinerja yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan hubungan sebab akibat dan keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya.

Matriks keselarasan kinerja yang dituangkan dalam Misi ke-5 Kab. Morowali Utara adalah sebagai berikut :

MISI 5

Tujuan : Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif

Indikator Tujuan :

1. Predikat SAKIP - Persentase Capaian Kinerja BKPSDMD
2. Opini BPK - Jumlah Temuan BPK dalam Laporan Keuangan BKPSDMD
3. Indeks RB - Persentase Penerapan Sistem Manajemen ASN dalam Reformasi Birokrasi
4. Nilai LPPD - Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Sasaran Strategis BKPSDMD :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian
3. Meningkatnya pengelolaan anggaran BKPSDMD
4. Meningkatnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara
5. Meningkatnya rasio pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara

Indikator Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama (IKU) :

1. Persentase tingkat capaian kinerja BKPSDMD
2. Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu
4. Persentase tingkat penyerapan anggaran BKPSDMD
5. Pengelolaan Anggaran BKPSDMD bebas temuan BPK

6. Indeks Profesionalitas ASN meningkat dibanding tahun sebelumnya
7. Rasio pegawai Perguruan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
8. Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
9. Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

B. Perjanjian Kinerja

Mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja dapat diharapkan terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Di lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 oleh kepala Perangkat Daerah, termasuk Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara dengan Bupati Morowali Utara (terlampir).

Adapun sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022, adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja BKPSDMD
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang efektif dan efisien	Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	75 %
		Persentase Pegawai yang berpendidikan S1, S2, dan S3	68,19 %
		Persentase Kesesuaian Penempatan PNS dalam Jabatan sesuai Kompetensi dan Kualifikasi	65 %
		Persentase Pegawai Fungsional (%)(PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	0,20 %
		Persentase Penilaian Kinerja Pegawai yang bernilai sangat baik (%)	5,40 %
		Persentase Penerapan Sanksi Pelanggaran Disiplin	75 %
		Persentase PNS yang mengikuti diklat sesuai kompetensi	3,50%
		Persentase PNS yang bersertifikat kompetensi (kecuali Guru dan Tenaga Kesehatan)	0,20 %

Program

Anggaran

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 7.206.316.353,00
2. Program Kepegawaian Daerah	Rp. 1.492.986.155,00
Total Anggaran	Rp. 8.699.302.508,00

Pada Triwulan ke-2 khususnya di bulan Juli 2022 dilakukan perubahan indikator kinerja perangkat daerah melalui Perjanjian Kinerja Perubahan 2022 atas hasil rekomendasi Tim Evaluasi SAKIP-RB KemenpanRB. Adapun sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 (terlampir), adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.5.
Perjanjian Kinerja Perubahan BKPSDMD
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai LPPD	>80-90 A (Memuaskan)
		Indeks RB	>60-70 B (Baik)
		Indeks Profesionalitas ASN	61-70 (Rendah)

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 7.206.316.353,00
2. Program Kepegawaian Daerah	Rp. 1.492.986.155,00
Total Anggaran	Rp. 8.699.302.508,00

Pada triwulan III Tahun 2022 tepatnya pada bulan Oktober 2022, dilaksanakan Perubahan Anggaran BKPSDMD sebagaimana perubahan APBD yang tertuang dalam DPPA BKPSDMD Tahun 2022 dimana total anggaran yang sebelum sebesar Rp.8.699.302.508,00 berubah menjadi Rp. 9.663.793.312,00 setelah Perubahan APBD Tahun 2022. Adapun sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kedua Tahun 2022 (terlampir), adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.6.
Perjanjian Kinerja Perubahan Kedua BKPSDMD
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase tingkat capaian kinerja BKPSDMD	≥92 %
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat	70
		Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	65 %
3	Meningkatnya pengelolaan anggaran BKPSDMD	Persentase tingkat penyerapan anggaran BKPSDMD	≥85 %
		Pengelolaan Anggaran BKPSDMD bebas temuan BPK	0 Temuan
4	Meningkatnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas ASN meningkat dibanding tahun sebelumnya	40
5	Meningkatnya rasio pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	Rasio pegawai Perguruan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga)	210 %
		Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	15 %
		Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	35 %

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 7.845.467.063,00
2. Program Kepegawaian Daerah	Rp. 1.818.326.249,00
Total Anggaran	Rp. 9.663.793.312,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam pengukuran kinerja menggunakan kategorisasi/predikat capaian kinerja sebagaimana dimuat dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Predikat Kinerja	
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	ST
2	$76 \leq 90$	Tinggi	T
3	$66 \leq 75$	Sedang	S
4	$51 \leq 65$	Rendah	R
5	≤ 50	Sangat Rendah	SR

Hasil pengukuran capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2022

Adapun perbandingan target dengan realisasi kinerja BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2.
Pengukuran Capaian IKU BKPSDMD
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PREDIKAT KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=5/4*100%	(7)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase tingkat capaian kinerja BKPSDMD	≥92	96,69	105,10	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat	70	78,48	112,11	Sangat Tinggi
		Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	65	96,10	147,85	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya pengelolaan anggaran BKPSDMD	Persentase tingkat penyerapan anggaran BKPSDMD	≥85	95,18	111,98	Sangat Tinggi
		Pengelolaan Anggaran BKPSDMD bebas temuan BPK	0	0	100,00	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas ASN meningkat dibanding tahun sebelumnya	40	40,73	101,83	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya rasio pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	Rasio pegawai Perguruan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga)	210	249,31	118,72	Sangat Tinggi
		Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	15	16,75	111,67	Sangat Tinggi
		Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	35	36,61	104,60	Sangat Tinggi

Sumber: Data SAKIP Tahun 2022 diolah

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Revisi IKU Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022-2026. Berdasarkan capaian indikator kinerja pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran strategis pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara di Tahun 2022 telah tercapai sesuai dengan target yang telah

ditetapkan pada Revisi IKU Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022-2026 dan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022.

Adapun pencapaian indikator kinerja sasaran berdasarkan sasaran strategis RPJMD 2016-2021 sesuai dengan skala pengukuran ordinal dirinci dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3.
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran BKPSDMD
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021
Berdasarkan Skala Pengukuran Ordinal

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	91≥	76≥90	66≥75	51≥65	≤50
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	- Persentase tingkat capaian kinerja BKPSDMD	≥92	96,69	105,10	V				
	CAPAIAN RATA-RATA			105,10%	V				
2.	- Indeks Kepuasan Masyarakat	70	78,48	112,11	V				
	- Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	65	96,10	147,85	V				
	CAPAIAN RATA-RATA			129,98%	V				
3.	- Persentase tingkat penyerapan anggaran BKPSDMD	≥85	95,18	111,98	V				
	- Pengelolaan Anggaran BKPSDMD bebas temuan BPK	0	0	100,00	V				
	CAPAIAN RATA-RATA			105,99%	V				
4.	- Indeks Profesionalitas ASN meningkat dibanding tahun sebelumnya	40	40,73	101,83	V				
	CAPAIAN RATA-RATA			101,83%	V				
5.	- Rasio pegawai Perguruan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga)	210	249,31	118,72	V				
	- Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	15	16,75	111,67	V				
	- Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	35	36,61	104,60	V				
	CAPAIAN RATA-RATA			111,66%	V				

Sumber : Data olahan BKPSDMD Kab. Morowali Utara 2022

Gambaran pencapaian kinerja dari 5 (lima) sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Sasaran Kesatu** : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
Sasaran Kesatu dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu Persentase tingkat capaian kinerja BKPSDMD. Pada tahun 2022, indikator ini terealisasi dengan pencapaian kinerja sebesar 105,10% dengan predikat Sangat Tinggi. Capaian rata-rata capaian sasaran kesatu adalah 105,10%.
2. **Sasaran Kedua** : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian.
Sasaran Kedua dapat dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu 1) Indeks Kepuasan Masyarakat dan 2) Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu. Pada Tahun 2022, indikator pertama, tingkat capaiannya sebesar 112,11 % dengan predikat Sangat Tinggi dan indikator kedua dengan tingkat capaian sebesar 147,85 % dengan predikat Sangat Tinggi. Capaian rata-rata capaian sasaran kedua adalah 129,98 %.
3. **Sasaran Ketiga** : Meningkatnya pengelolaan anggaran BKPSDMD.
Sasaran Ketiga dapat dilihat dari 2 indikator yaitu 1) Persentase tingkat penyerapan anggaran BKPSDMD dan 2) Pengelolaan Anggaran BKPSDMD bebas temuan BPK. Pada tahun 2022 kedua indikator ini capaian kinerjanya masing-masing adalah 111,98% dan 100% sehingga berpredikat Sangat Tinggi. Capaian rata-rata capaian sasaran ketiga adalah 105,99%.
4. **Sasaran Keempat** : Meningkatnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara.
Sasaran Keempat dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu Indeks Profesionalitas ASN meningkat dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, capaian kinerja indikator ini sebesar 101,83% dengan predikat Sangat Tinggi. Capaian rata-rata capaian sasaran keempat adalah 101,83%.
5. **Sasaran Kelima** : Meningkatnya rasio pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
Sasaran Kelima dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator yaitu 1) Rasio pegawai Perguruan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga), 2) Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan 3) Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan). Pada tahun 2022, pengukuran capaian kinerja untuk sasaran kelima yang dipengaruhi oleh 3 indikator memperoleh pencapaian kinerja rata-rata di atas 100% dengan predikat Sangat Tinggi. Capaian rata-rata capaian sasaran kelima adalah 111,66%.

Dari tabel 3.2 dan 3.3. di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 seluruhnya di atas 100% dengan predikat Sangat Tinggi.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja antara Tahun 2022 dengan Tahun 2021

Tabel 3.4.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja antara Tahun 2022 dengan Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tingkat Capaian REALISASI 2021	Tingkat Capaian REALISASI 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase tingkat capaian kinerja BKPSDMD	0	105,10
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	112,11
		Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	0	147,85
3	Meningkatnya pengelolaan anggaran BKPSDMD	Persentase tingkat penyerapan anggaran BKPSDMD	0	111,98
		Pengelolaan Anggaran BKPSDMD bebas temuan BPK	0	100,00
4	Meningkatnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas ASN meningkat dibanding tahun sebelumnya	0	101,83
5	Meningkatnya rasio pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	Rasio pegawai Perguruan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga)	0	118,72
		Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	0	111,67
		Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	0	104,60

Sumber : Data olahan BKPSDMD Kab. Morowali Utara 2022

Dari tabel di atas, indikator kinerja sasaran yaitu Kualifikasi pada Tahun 2021 tidak dapat dipaparkan dikarenakan di Tahun 2021 terjadi perbedaan indikator kinerja dengan tahun 2022. Hal ini disebabkan karena di tahun 2022 dilakukan perubahan IKU Kepala Daerah dan IKU Perangkat Daerah.

Adapun realisasi kinerja Sasaran Kesatu pada Tahun 2022 sebesar 96,69% atau mencapai 105,10%, Sasaran Kedua sebesar 78,48 dan 96,10% atau mencapai 112,11% dan 147,85%. Sasaran Ketiga sebesar 95,18% dan 0 temuan atau sebesar 111,98% dan 100%. Sasaran Keempat sebesar 40,73 atau sebesar 101,83%. Sasaran Kelima sebesar 249,31%, 16,75% dan 36,61% atau sebesar 118,72%, 111,67%, 104,60%.

3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target akhir RENSTRA Tahun 2021-2026.

Untuk melihat gambaran realisasi kinerja dengan target akhir Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.5.
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target akhir RENSTRA Tahun 2021-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian RENSTRA 2021-2026	Realisasi 2022	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=5/4 x 100%
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase tingkat capaian kinerja BKPSDMD	≥96	96,69	100,72%
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	78,48	98,10%
		Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	97	96,10	99,07%
3	Meningkatnya pengelolaan anggaran BKPSDMD	Persentase tingkat penyerapan anggaran BKPSDMD	≥97	95,18	98,12%
		Pengelolaan anggaran BKPSDMD bebas temuan BPK	0	0	100%
4	Meningkatnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas ASN meningkat dibanding tahun sebelumnya	60	40,73	67,88%
5	Meningkatnya rasio pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	Rasio pegawai Perguruan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga)	250	249,31	99,72%
		Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	19	16,75	88,16%
		Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	95	36,61	38,54%

Sumber : Data olahan BKPSDMD Kab. Morowali Utara 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja sasaran Tahun 2022 terhadap target capaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- 2 Indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≥ 100%
- 4 indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≥ 90%
- 1 Indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≥ 80%
- 1 Indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≥ 60%
- 1 Indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≥ 30%

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Realisasi kinerja tujuan dan sasaran BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara adalah merupakan akumulasi dan kompilasi dari capaian kinerja seluruh program/kegiatan. Secara umum seluruh program dan kegiatan BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2022 telah selesai dilaksanakan. Dari pelaksanaan semua program/kegiatan tersebut, terdapat sejumlah faktor **penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**. Hal tersebut didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai dengan triwulan IV Tahun 2022. Lebih rinci diuraikan sebagai berikut :

Untuk **Indikator Kinerja Utama Kesatu** yaitu Persentase tingkat capaian kinerja BKPSDMD, target kinerja telah tercapai dengan sangat baik, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yaitu kapasitas sumber daya manusia pelaksana teknis penyusunan dan pelaporan evaluasi kinerja masih terbatas sehingga membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak dalam penyusunan laporan. Selain itu, belum maksimalnya format dan pelaporan evaluasi renja perangkat daerah juga turut menjadi penghambat dalam pencapaian target per tahun karena sering terjadi inkonsistensi bahan dan data. Sebagai alternative solusi, atasan langsung telah memberi kesempatan kepada pelaksana teknis untuk meningkatkan kompetensi melalui bimbingan langsung ke pihak terkait atau mengembangkan kompetensi diri secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

Untuk **Indikator Kinerja Utama Kedua** yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, target kinerja telah tercapai dengan sangat baik, namun belum maksimalnya pelaksanaan survey kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan kepegawaian di BKPSDMD menyebabkan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat melebihi tenggang waktu yang seharusnya. Hal ini dikarenakan survey baru dilaksanakan di triwulan IV tahun 2022 sehingga masih membutuhkan waktu bagi pelaksana untuk menyesuaikan diri. Solusi yang diambil untuk mengatasi kendala yang ada, pimpinan telah menambah jumlah pegawai yang menangani survey kepuasan sehingga diharapkan dapat meminimalisasi kendala yang ada.

Untuk **Indikator Kinerja Utama Ketiga** yaitu Persentase administrasi

kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu, target kinerja telah tercapai dengan sangat baik. Adapun terkait dengan faktor penghambat, hal ini disebabkan karena masih kurang tertibnya pengadministrasian dokumen sehingga perekapan hanya dilakukan pada saat ada permintaan data. Solusi yang dilakukan adalah mengambil teknik jemput bola ke semua pelaksana dan pengelola layanan.

Untuk **Indikator Kinerja Utama Keempat** yaitu Persentase tingkat penyerapan anggaran BKPSDMD, target kinerja telah tercapai dengan sangat baik. Faktor penghambat atau kendala dalam pencapaian target kinerja untuk indikator ini disebabkan belum tersusunnya rencana aksi dan jadwal pelaksanaan program dan kegiatan sesuai rencana kerja BKPSDMD sehingga terkadang ada kegiatan yang tidak sempat terlaksana dengan baik.

Untuk **Indikator Kinerja Utama Kelima** yaitu Pengelolaan Anggaran BKPSDMD bebas temuan BPK, target kinerja telah tercapai dengan sangat baik. Faktor kendala terkadang dihadapi dalam pemenuhan target capaian adalah kedisiplinan pegawai dalam pendokumentasian laporan hasil pelaksanaan tugas yang mana beberapa pegawai dalam pengumpulan laporan sering melebihi tenggang waktu yang seharusnya.

Untuk **Indikator Kinerja Utama Keenam** yaitu Indeks Profesionalitas ASN meningkat dibanding tahun sebelumnya, meski target kinerja telah tercapai dengan baik, namun pencapaian target kinerja ini masih terkendala pada penerimaan laporan nilai Indeks Profesionalitas ASN yang harus menunggu informasi dari BKN. Hal ini karena BKPSDMD belum melakukan pengukuran mandiri atas Indeks Profesionalitas ASN. Sehingga terkadang saat penyusunan laporan kinerja, nilai indeks berpotensi dikosong jika tenggang waktu pengumpulan laporan belum memungkinkan bagi pelaksana teknis untuk mencantumkan nilai karena belum ada informasi yang diterima dari BKN. Solusi yang dapat diambil dalam rangka meminimalisasi dampak dari kendala yang ada adalah dengan memperkuat komunikasi dan hubungan antar personal dengan pegawai yang bekerja di BKN untuk memudahkan pencarian informasi terkait Nilai Indeks Profesionalitas ASN.

Untuk **Indikator Kinerja Utama Ketujuh** yaitu Rasio pegawai Perguruan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga), target kinerja telah tercapai dengan sangat baik. Adapun faktor penghambat untuk

indikator ini biasanya disebabkan BKPSDMD belum bisa menjadi faktor pendorong kepada ASN untuk melanjutkan pendidikan. Hal ini disebabkan karena belum tersusunnya rencana pengembangan kompetensi bagi ASN Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sehingga belum ada arah yang jelas untuk pengembangan kompetensi bagi setiap ASN. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dari Perguruan Tinggi yang berkerja sama dengan pemerintah daerah dalam penyebaran informasi terkait penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi tersebut.

Untuk **Indikator Kinerja Utama Kedelapan** yaitu Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), target kinerja telah tercapai dengan sangat baik. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan penyetaraan jabatan di akhir tahun 2021 bagi pejabat pengawas yang disetarakan menjadi pejabat fungsional karena tuntutan Reformasi Birokrasi. Adapun pelaksanaan pengadaan pejabat fungsional di luar konteks tersebut, baik melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, atau melalui promosi, biasanya tidak serta merta dapat dilakukan. Ini disebabkan karena adanya keterbatasan formasi jabatan fungsional yang tersedia dalam peta jabatan. Keterbatasan jabatan ini disebabkan analisis jabatan/analisis beban kerja belum tersusun secara berkualitas berdasarkan kebutuhan di organisasi perangkat daerah. Sehingga untuk penambahan jumlah pejabat fungsional secara situasional tidak serta merta dapat dilakukan. Kendala yang lain adalah masih minimnya penyebaran informasi terkait jabatan fungsional. Solusi yang dapat dilakukan untuk saat ini adalah dengan melakukan pengadaan pejabat fungsional melalui jalur CASN.

Untuk **Indikator Kinerja Utama Kesembilan** yaitu Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), target kinerja telah tercapai dengan baik. Faktor penghambat atau kendala dalam pencapaian target kinerja untuk indikator ini disebabkan belum tersusunnya rencana pengembangan kompetensi ASN dan juga belum optimalnya pembinaan jabatan fungsional di lingkup pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

Dari uraian berbagai macam faktor penghambat dan pendorong untuk setiap indikator tersebut, secara keseluruhan masih dapat diatasi sehingga semua target kinerja dapat tercapai dengan baik. Secara khusus, hambatan atau

kendala yang dihadapi dalam pencapaian target berkaitan dengan dinamika perubahan arah kebijakan pemerintah pusat pada sistem kelembagaan dan birokrasi, belum optimalnya disiplin ASN Kabupaten Morowali Utara; aplikasi kepegawaian belum terintegrasi; belum optimalnya perencanaan ASN; belum optimalnya pemberdayaan KORPRI dan pembekalan bagi pegawai yang memasuki masa pensiun; dan belum optimalnya audit atau assesment, perencanaan pengembangan karir, pola karir, promosi dan mutasi ASN sehingga dibutuhkan waktu dalam penyesuaiannya.

Adanya keterbatasan anggaran dan beberapa faktor penghambat, tak serta merta membuat pencapaian tujuan dan sasaran melemah. Kerja keras semua pihak khususnya para pengelola keuangan dan pimpinan kegiatan beserta staf yang saling mendukung guna merealisasikan tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah direncanakan dalam dokumen Renstra dan Pengukuran Kinerja menjadi faktor pendorong pencapaian target kinerja.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pada tahun anggaran 2022, sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA 2022) yang kemudian diubah dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA 2022), BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara melaksanakan 2 (dua) program dengan 9 (sembilan) kegiatan yang dijabarkan ke dalam 19 (Sembilan belas) sub kegiatan. Total realisasi anggaran secara keseluruhan dari Belanja BKPSDMD tahun anggaran 2022 yakni Rp. 9.197.714.591,00 dari total pagu sebesar Rp. 9.663.793.312,00 atau sebesar 95,18% dengan rata-rata capaian kinerja keuangan adalah sebesar 88,75% yang berarti bahwa realisasi kinerja keuangan berada pada interval 76%-90% yang merupakan kriteria penilaian kinerja "TINGGI". Sedangkan capaian realisasi kinerja (capaian *outcome* program dan *output* kegiatan) atas keseluruhan Belanja adalah pada angka 96,69% dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 98,95% yang berarti bahwa realisasi kinerja berada pada interval 91%-100% yang merupakan kriteria penilaian kinerja "SANGAT TINGGI".

Adapun mengenai tingkat efisien atas penggunaan sumber daya yang ada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara di Tahun 2022, diuraikan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.6.
Alokasi dan Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Utama
BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)		TINGKAT EFISIENSI (%)
					KINERJA	ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=6-7
1	1. Persentase tingkat capaian kinerja BKPSDMD 2. Indeks Kepuasan Masyarakat 3. Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu 4. Persentase tingkat penyerapan anggaran BKPSDMD 5. Pengelolaan Anggaran BKPSDMD bebas temuan BPK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.649.388.214	4.551.999.553	99,05	97,71	1,34
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah + Honorarium Pengelola Keuangan	3.917.847.498	3.832.165.037	100	97,81	2,19
		Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat daerah	407.552.716,00	403.033.016,00	95,24	98,89	-3,65
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.034.000,00	19.462.500	100	97,15	2,85
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.446.000,00	181.914.000	100	99,71	0,29
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.508.000,00	115.425.000	100	94,99	5,01
2	6. Indeks Profesionalitas ASN meningkat dibanding tahun sebelumnya 7. Rasio pegawai Perguruan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga) 8. Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 9. Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.196.078.849	3.186.289.890	100	99,69	0,31
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.196.078.849	3.186.289.890	100	99,69	0,31
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.818.326.249	1.459.425.148	99,41	80,26	19,15
		Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	738.744.099	707.465.181	98,22	95,77	2,45

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)		TINGKAT EFISIENSI (%)
					KINERJA	ANGGARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=6-7
		Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	99.720.000	93.842.100	100	94,11	5,89
		Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	979.862.150	658.117.867	100	67,16	32,84
JUMLAH			9.663.793.312	9.197.714.591	96,69	95,18	1,51

Sumber : Data olahan BKPSDMD Kab. Morowali Utara 2022

Dari tabel di atas, terlihat bahwa dari 2 (dua) Program yang terdiri atas 9 (Sembilan) Kegiatan, terdapat 1 kegiatan yang alokasi anggaran dan realisasi kinerjanya ***kurang efisien*** yaitu Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tingkat efisiensinya bernilai -3,65%. Sementara 8 Kegiatan lainnya telah dilakukan efisiensi dan yang paling efisien adalah Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN dengan tingkat efisiensi mencapai 32,84%. Secara keseluruhan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 dengan total realisasi anggaran sebesar RP. 197.714.591,00 dari pagu sebesar Rp. 9.663.793.312,00 mencapai capaian kinerja sebesar 96,69% dengan serapan anggaran sebesar 95,18% telah melakukan efisiensi anggaran sebesar 1,51%.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tingkat capaian kinerja tujuan/sasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja. Penyebab keberhasilan / kegagalan kinerja tujuan/sasaran dikelompokkan menjadi dua yaitu yang disebabkan oleh program/kegiatan. Secara rinci penyebab keberhasilan / kegagalan kinerja tujuan/sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.7.
Realisasi *Outcome* Program Terhadap Capaian Sasaran BKPSDMD
Tahun 2022

NO.	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=5/4
	TUJUAN :				
	<i>Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif</i>				
	INDIKATOR TUJUAN 1	Persentase Capaian Kinerja BKPSDMD (Predikat SAKIP)			
	SS.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase tingkat capaian kinerja BKPSDMD	≥92	96,69	105,10
	SS.2 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat	70	78,48	112,11
		Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	65	96,10	147,85
	INDIKATOR TUJUAN 2	Jumlah Temuan BPK dalam Laporan Keuangan BKPSDMD (Opini BPK)			
	SS.3 Meningkatnya pengelolaan anggaran BKPSDMD	Persentase tingkat penyerapan anggaran BKPSDMD	≥85	95,18	111,98
		Pengelolaan Anggaran BKPSDMD bebas temuan BPK	0	0	100,00
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (5/6)	83,33	82,54	99,05
1.1.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100	100
1.1.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (36)	100%	100%	100
1.2.	Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	95,24%	95,24
1.2.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (4)	100%	100%	100%
1.2.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (4)	100%	100%	100
1.2.3.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (1)	100%	85,71%	85,71
1.3.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100
1.3.1.	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (1)	100%	100%	100
1.4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100%	100%	100

NO.	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=5/4
	Daerah	Pemerintahan Daerah			
1.4.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (1)	100%	100%	100
1.4.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (1)	100%	100%	100
1.5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terseleenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100
1.5.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (1)	100%	100%	100
1.5.2.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (10)	100%	100%	100
1.5.3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (1)	100%	100%	100
	INDIKATOR TUJUAN 3	Persentase Penerapan Sistem Manajemen ASN dalam Reformasi Birokrasi (Indeks RB)			
	SS.4 Meningkatnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas ASN meningkat dibanding tahun sebelumnya	40	40,73	101,83
	INDIKATOR TUJUAN 4	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dengan bobot 20% (Nilai LPPD)			
	SS.5 Meningkatnya rasio pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	Rasio pegawai Perguruan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga)	210	249,31	118,72
		Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	15	16,75	111,67
		Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	35	36,61	104,60
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1/6)	16,67	16,51	99,05
1.6.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terseleenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100
1.6.1.	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (295)	100%	100%	100
2.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pengelolaan Manajemen ASN	100%	99,41%	99,41

NO.	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=5/4
2.1.	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	100,00%	98,22%	98,22
2.1.1.	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (1)	100,00%	92,86%	92,86
2.1.2.	Sub Kegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN (1)	100,00%	100%	100
2.1.3.	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (12)	100,00%	100%	100
2.1.4.	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (12)	100,00%	100%	100
2.2.	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya Pemrosesan Mutasi dan Promosi ASN Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	100,00%	100,00%	100,00
2.2.1.	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (12)	100,00%	100,00%	100,00
2.2.2.	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (2)	100,00%	100,00%	100,00
2.3.	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	100,00%	100,00%	100,00
2.3.1.	Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (1)	100,00%	100,00%	100,00
2.3.2.	Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (5)	100,00%	100,00%	100,00

Sumber: Data Hasil Evaluasi RENJA BKPSDMD Triwulan IV Tahun 2022 diolah

Selanjutnya, capaian kegiatan pada program yang mendukung capaian sasaran BKPSDMD di Tahun 2022 sebagaimana disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.8.
Capaian Kinerja Layanan Kepegawaian di
Bidang Informasi, Pengadaan, Pemberhentian, Mutasi dan Promosi
Tahun 2022

NO.	URAIAN	Jumlah Dokumen yang Masuk	Jumlah Dokumen yang Selesai Tepat Waktu	Ket.	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=4/3*100%
1	Penyusunan Kebutuhan ASN	-	-		-
2	Pemberkasan usul penetapan NIP CPNS	256	256		100,00
3	Pemberkasan usul penetapan NI CPPPK	182	182		100,00
4	Penetapan SK Pengangkatan CPNS dan PPPK	438	438		100,00
5	Penyampaian SK Pengangkatan CPNS dan PPPK	438	438		100,00
6	Usulan Karis	92	91		98,91
7	Usulan Karsu	130	130		100,00
8	Usulan Karpeg	128	117		91,41
9	Kartu Peserta Taspen	353	95	258 sementara proses	26,91
10	Permohonan Cuti Tahunan	1428	1428		100,00
11	Permohonan Cuti Besar	7	7		100,00
12	Permohonan Cuti Sakit	109	109		100,00
13	Permohonan Cuti Melahirkan	91	91		100,00
14	Permohonan Cuti Karena Alasan Penting	165	165		100,00
15	Pengusulan Kenaikan Pangkat	1.032	1.032		100,00
16	Kenaikan Gaji Berkala	1.200	1.200		100,00
17	Pengusulan Mutasi Dalam Daerah	48	43		89,58
18	Pengusulan Mutasi Antar Daerah	24	24		100,00
19	Pengangkatan CPNS menjadi PNS	97	97		100,00
20	Pengusulan Pemberhentian Dengan Hormat karena Meninggal	10	10		100,00
21	Pengusulan Pemberhentian Dengan Hormat atas permintaan sendiri	1	1		100,00
22	Pengusulan Pemberhentian Dengan Hormat karena Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP)	53	53		100,00
23	Permohonan Informasi Data Statistik dan Biodata Pegawai	-	-		-
24	Penyajian Peraturan Perundang-undangan bidang Kepegawaian	-	-		-
25	Informasi Kepegawaian melalui Offline dan Online	-	-		-
26	Upacara Persemayaman	-	-		-
27	Pengelolaan Data dan Informasi Pegawai secara elektronik melalui aplikasi Si-ASN/SAPK	-	-		-
28	Informasi Kepegawaian melalui konsultasi kebijakan operasional di Bidang Kepegawaian	-	-		-
29	Permohonan surat keterangan terkait dokumen Kepegawaian	-	-		-
30	Pengesahan Dokumen Kepegawaian	-	-		-
TOTAL		6.282	6.007	258	95,62

Sumber : Data olahan BKPSDMD Kab. Morowali Utara 2022

Tabel 3.9.
Capaian Kinerja Layanan Kepegawaian di
Bidang Pengembangan, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur
Tahun 2022

NO.	URAIAN	Jumlah Dokumen yang Masuk	Jumlah Dokumen yang Selesai Tepat Waktu	Ket.	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=4/3*100 %
1	Pelatihan Dasar (LATSAR)	257	257		100,00
2	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)	15	15		100,00
3	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II (PKN II)	1	1		100,00
4	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	-	-		
5	Diklat Teknis	-	-		
6	Diklat Fungsional	-	-		
7	Permohonan Tugas Belajar	44	44		100,00
8	Permohonan Bantuan Tugas Belajar	5	5		100,00
9	Pelantikan dalam Jabatan Struktural	164	164		100,00
10	Pelantikan dalam Jabatan Fungsional	61	61		100,00
11	Pengambilan Sumpah PNS	225	225		100,00
12	Seleksi Pengisian JPT Pratama	-	-		
13	Uji Kompetensi	20	20		100,00
14	Penetapan Pemberhentian Sementara PNS	5	5		100,00
15	Penetapan Pengaktifan Kembali sebagai PNS	-	-		
16	Penilaian Kinerja Pegawai	-	-		
17	Rekomendasi TPP	-	-	-	
18	Pengajuan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin	-	-		
19	Penetapan Hukuman Disiplin	10	10		100,00
20	Permohonan Ijin Perceraian	13	11		84,62
21	Usulan Satya Lencana Karya Satya	-	-		
TOTAL		820	818		99,76

Sumber : Data olahan BKPSDMD Kab. Morowali Utara 2022

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa di Tahun 2022 total layanan administrasi kepegawaian di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

1. Bidang Informasi, Pengadaan, Pemberhentian, Mutasi dan Promosi melayani sebanyak 6.282 dokumen yang masuk, 6.007 dokumen yang selesai tepat waktu,

258 dokumen sementara dalam proses dan bidang ini memperoleh tingkat capaian sebesar 95,62%.

2. Bidang Pengembangan, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur melayani sebanyak 820 dokumen yang masuk, 818 dokumen yang selesai tepat waktu dan bidang ini memperoleh tingkat capaian sebesar 99,76%.

Total dokumen yang masuk di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun 2022 adalah sebanyak 7.102 dokumen. Total dokumen yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 6.825 dokumen. Total tingkat capaian pelayanan administrasi kepegawaian adalah :

$$\frac{6.825}{7.102} \times 100\% = 96,10\%$$

Jadi, persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 adalah sebesar 96,10%.

B. Realisasi Anggaran

Capaian realisasi anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.10.

Anggaran dan Realisasi Anggaran pada BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara TA. 2022

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	(%)
5	BELANJA	9.663.793.312,00	9.197.714.591,00	95,18
5.1	BELANJA OPERASI	9.234.661.368,00	8.769.171.492,00	94,96
5.1.01	Belanja Pegawai	3.921.347.498,00	3.835.665.037,00	97,81
5.1.02	Belanja Barang	5.313.313.870,00	4.933.506.455,00	92,85
5.2	BELANJA MODAL	429.131.944,00	428.543.099,00	99,86
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	429.131.944,00	428.543.099,00	99,86

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran BKPSDMD Per 31 Desember 2022

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa realisasi anggaran BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara mencapai 95,18%. Nilai ini diperoleh dari perhitungan jumlah total realisasi anggaran tahun 2022 dibagi dengan total pagu anggaran untuk Tahun 2022 dikali 100%. Diperoleh penyelesaian sebagai berikut :

$$\frac{9.197.714.591,00}{9.663.793.312,00} \times 100\% = 95,18\%$$

Jadi, capaian anggaran BKPSDMD Tahun 2022 adalah sebesar 95,18%.

Sementara itu, dari Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagai mana yang terlampir pada **Lampiran 4**, diketahui bahwa **Belanja Yang Tidak Dievaluasi** sebesar Rp 3.917.847.498,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.832.165.037,00 atau 97,81% sebagaimana yang tercantum dalam Tabel berikut ini :

Tabel 3.11.

Anggaran dan Realisasi Belanja Yang Tidak Dievaluasi pada BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara TA. 2022

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	(%)
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.872.247.498,00	3.786.565.037,00	97,79
2.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	45.600.000,00	45.600.000,00	100
	TOTAL	3.917.847.498,00	3.832.165.037,00	97,81

Sumber : Evaluasi Renja BKPSDMD Triwulan IV Tahun 2022

Dengan perhitungan tingkat capaian sebagai berikut :

$$\frac{3.832.165.037,00}{3.917.847.498,00} \times 100\% = 97,81\%$$

Sedangkan anggaran **Belanja Yang Dievaluasi** Tahun 2022 sebesar Rp 5.745.945.814,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.365.549.554,00 atau 93,38% sebagaimana yang tercantum dalam Tabel berikut ini :

Tabel 3.12.

Anggaran dan Realisasi Belanja Yang Dievaluasi pada BKPSDMD Kabupaten Morowali Utara TA. 2022

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	(%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.927.619.565,00	3.906.124.406,00	99,45
1.1	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.196.078.849,00	3.186.289.890,00	99,69
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.196.078.849,00	3.186.289.890,00	99,69
1.2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	407.552.716,00	403.033.016,00	98,89
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	138.238.666,00	138.123.680,00	99,92
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.999.850,00	35.785.000,00	99,40
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	233.314.200,00	229.124.336,00	98,20
1.3	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.034.000,00	19.462.500,00	97,15
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.034.000,00	19.462.500,00	97,15

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	(%)
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.446.000,00	181.914.000,00	99,71
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	6.060.000,00	6.050.000,00	99,83
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	176.386.000,00	175.864.000,00	99,70
1.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.508.000,00	115.425.000,00	94,99
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.000.000,00	27.047.000,00	96,60
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.580.000,00	1.450.000,00	22,04
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	86.928.000,00	86.928.000,00	100
2.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.818.326.249,00	1.459.425.148,00	80,26
2.1	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	738.744.099,00	707.465.181,00	95,77
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	708.744.649,00	686.235.731,00	96,82
	Sub Kegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	9.999.750,00	6.939.750,00	69,40
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	9.999.850,00	6.939.850,00	69,40
	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	9.999.850,00	7.349.850,00	73,50
2.2	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	99.720.000,00	93.842.100,00	94,11
	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	15.000.000,00	12.669.700,00	84,46
	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	84.720.000,00	81.172.400,00	95,81
2.3	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	979.862.150,00	658.117.867,00	67,16
	Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	727.861.050,00	406.116.767,00	55,80
	Sub kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	252.001.100,00	252.001.100,00	100%
	TOTAL	5.745.945.814,00	5.365.549.554,00	93,38

Sumber : Evaluasi Renja BKPSDMD Triwulan IV Tahun 2022

Dengan perhitungan tingkat capaian sebagai berikut :

$$\frac{5.365.549.554,00}{5.745.945.814,00} \times 100\% = 93,38\%$$

Adapun realisasi anggaran untuk masing-masing program dan kegiatan beserta capaiannya pada Tahun 2022 dapat diuraikan seperti pada tabel berikut

Tabel. 3.10.
 Realisasi Anggaran per 31 Desember 2022
 Sesuai DPPA BKPSDMD Tahun Anggaran 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)=5/4
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.845.467.063,00	7.738.289.443,00	98,63%
1.1.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.872.247.498	3.786.565.037	97,79%
1.1.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.872.247.498	3.786.565.037	97,79%
1.2.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.196.078.849	3.186.289.890	99,69%
1.2.1.	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.196.078.849	3.186.289.890	99,69%
1.3.	Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat daerah	407.552.716	403.033.016	98,89%
1.3.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	138.238.666	138.123.680	99,92%
1.3.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.999.850	35.785.000	99,40%
1.3.3.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	233.314.200	229.124.336	98,20%
1.4.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.034.000	19.462.500	97,15%
1.4.1.	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.034.000	19.462.500	97,15%
1.5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	228.046.000	227.514.000	99,77%
1.5.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	6.060.000	6.050.000	99,83%
1.5.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	221.986.000	221.464.000	99,76%
1.6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.508.000	115.425.000	94,99%
1.6.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.000.000	27.047.000	96,60%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)=5/4
1.6.2.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.580.000	1.450.000	22,04%
1.6.3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	86.928.000	86.928.000	100,00%
2.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.818.326.249	1.459.425.148	80,26%
2.1.	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	738.744.099	707.465.181	95,77%
2.1.1.	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	708.744.649	686.235.731	96,82%
2.1.2.	Sub Kegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	9.999.750	6.939.750	69,40%
2.1.3.	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	9.999.850	6.939.850	69,40%
2.1.4.	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	9.999.850	7.349.850	73,50%
2.2.	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	99.720.000	93.842.100	94,11%
2.2.1.	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	15.000.000	12.669.700	84,46%
2.2.2.	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	84.720.000	81.172.400	95,81%
2.3.	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	979.862.150	658.117.867	67,16%
2.3.1.	Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	727.861.050	406.116.767	55,80%
2.3.2.	Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	252.001.100	252.001.100	100,00%
TOTAL		9.663.793.312	9.197.714.591	95,18%

Sumber : Data DPPA Tahun 2022 BKPSDMD Kab. Morowali Utara

BAB IV PENUTUP



Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara. Laporan ini disamping sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Bupati Morowali Utara juga sebagai bahan evaluasi internal bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara sehingga dapat diperoleh solusi yang konstruktif melalui berbagai kebijakan untuk memprioritaskan program pembangunan daerah dalam rangka mendukung visi misi kepala daerah sehingga pada akhirnya pembangunan di Kabupaten Morowali Utara dapat terlaksana dengan baik dan berdampak kepada meningkatkan opini hasil pemeriksaan BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan peningkatan nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

Secara umum, penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara telah terlaksana dan berjalan dengan SANGAT BAIK. Nilai capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 mencapai nilai 96,69% dari target 100% dengan nilai-rata-rata capaian kinerja sebesar 98,95% atau berpredikat SANGAT TINGGI, sedangkan capaian anggaran 95,18% dari target sebesar 100% dengan rata-rata tingkat kinerja anggaran sebesar 88,75% atau berpredikat TINGGI (Sumber : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDMD Triwulan IV Tahun 2022).

Adapun keberhasilan capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 : ***Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah*** dengan capaian kinerja 105,10% yang diperoleh melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu :
 - a. “Persentase tingkat capaian kinerja BKPSDMD”, dari target $\geq 92\%$ terealisasi 96,69% dengan tingkat capaian 105,10% (Sangat Tinggi).
2. Sasaran Strategis 2 : ***Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian*** dengan capaian kinerja 129,98% yang diperoleh melalui pencapaian 2 (dua)

indikator kinerja yaitu :

- a. “Indeks Kepuasan Masyarakat” dari target 70 terealisasi 78,48 dengan tingkat capaian 112,11% (Sangat Tinggi).
 - b. “Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu” dari target 65% terealisasi 96,10% dengan tingkat capaian 147,85% (Sangat Tinggi).
3. Sasaran Strategis 3 : ***Meningkatnya Pengelolaan Anggaran BKPSDMD*** dengan capaian kinerja 105,99% yang diperoleh melalui pencapaian 2 (dua) indikator kinerja yaitu :
- a. “Persentase tingkat penyerapan anggaran BKPSDMD” dari target $\geq 85\%$ terealisasi 95,18% dengan tingkat capaian 111,98% (Sangat Tinggi).
 - b. “Pengelolaan Anggaran BKPSDMD bebas temuan BPK” dari target 0 temuan terealisasi 0 temuan dengan tingkat capaian 100,00% (Sangat Tinggi).
4. Sasaran Strategis 4 : ***Meningkatnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara*** dengan capaian kinerja 101,83% yang diperoleh melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu :
- a. “Indeks Profesionalitas ASN meningkat dibanding tahun sebelumnya” dari target 40 terealisasi 40,73 dengan tingkat capaian 101,83% (Sangat Tinggi).
5. Sasaran Strategis 5 : ***Meningkatnya Rasio Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara*** dengan capaian kinerja 111,66% yang diperoleh melalui pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :
- a. “Rasio pegawai Perguruan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga)” dari target 210% terealisasi 249,31% dengan tingkat capaian 118,72% (Sangat Tinggi).
 - b. “Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)” dari target 15% terealisasi 16,75%. Dengan tingkat capaian 111,67% (Sangat Tinggi).
 - c. “Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)” dari target 35% terealisasi 36,61% dengan tingkat capaian 104,60% (Sangat Tinggi).

Berdasarkan hasil penilaian tersebut kami berupaya untuk mempertahankan nilai yang sudah sangat baik dan mengatasi kendala-kendala dalam pencapaian target kinerja. Selain itu peningkatan kualitas dokumen-dokumen perencanaan dan evaluasi menjadi perhatian khusus di tahun mendatang agar proses pelaporan kinerja dapat

berjalan lancar dan hasil capaian kinerja dapat sesuai dengan apa yang diharapkan.

Beberapa langkah-langkah penting yang akan diambil sebagai solusi dan saran perbaikan kinerja ke depannya yakni sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan untuk ASN seKabupaten Morowali Utara.
2. Peningkatan kegiatan pembinaan dan penegakan disiplin.
3. Pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional.
4. Melakukan inovasi sistem informasi (melaksanakan program/kegiatan secara daring/online).
5. Melakukan penilaian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala serta melakukan penyesuaian target capaian.
6. Mengembangkan indikator kinerja agar cakupan layanan menjadi lebih luas.

Kiranya Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja, Rencana Kinerja, Rencana Anggaran, dan Rencana Strategis pada masa-masa mendatang. Keselarasan Kinerja BKPSDMD

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 KESELARASAN KINERJA BKPSDM

LAMPIRAN 2 RENCANA AKSI TAHUN 2022

LAMPIRAN 3 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BKPSDM

**LAMPIRAN 4 EVALUASI TERHADAP HASIL PELAKSANAAN
RENJA TRIWULAN IV TAHUN 2022 BKPSDMD
KABUPATEN MOROWALI UTARA**

LAMPIRAN 5 PERJANJIAN KINERJA



KESELARASAN KEMERLA -OUTPUT-PENGANGGARAN PADA BADAN KEPEKERJAAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH KAB. MOWALI UTARA

BERDASARKAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2022

Kemampuan Kinerja Output Penganggaran

Kemampuan Kinerja Output Penganggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN FUNGSIONAL BERKUALITAS	NO	INISYATIF SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS BERKUALITAS	KST BUKAN KST	NO	PROGRAM		MUSKAB PROGRAM TERBUK DENDAH USABAB	REVISI			MUSKAB RENCANA TERBUK DENDAH USABAB		MUSKAB RENCANA TERBUK DENDAH USABAB		CATATAN	
								URAIAN PROGRAM	MUSKAB PROGRAM		URAIAN KOREKSI	MUSKAB REVISI	REVISI/LOKASI/KELOMPOK	MUSKAB RENCANA TERBUK DENDAH USABAB	REVISI	REVISI			
1.	Meningkatnya efisiensi dan kinerja pegawai daerah	Ya	1.1.	Perencanaan tingkat capaian kinerja (KPI/SMART)	Ya	80	1.	MOSKAB PTKN NABDI (KORUM) TUMBUK BUKIT LAMBAT	Pemerintah Kabupaten Pematang Siantar	Ya	Regulasi dan internalisasi Peraturan Perundang-undangan	Ya	Ya	1.011.203.000					
2.	Meningkatnya pengendalian anggaran (KPI/SMART)	Ya	1.1.	Perencanaan tingkat pengapalan anggaran (KPI/SMART)	Ya	80				Ya	Regulasi dan internalisasi Peraturan Perundang-undangan	Ya	Ya	Ya	100.200.000				
			1.1.	Perencanaan tingkat pengapalan anggaran (KPI/SMART)	Ya	80				Ya	Regulasi dan internalisasi Peraturan Perundang-undangan	Ya	Ya	Ya	90.000.000				
			1.1.	Perencanaan tingkat pengapalan anggaran (KPI/SMART)	Ya	80				Ya	Regulasi dan internalisasi Peraturan Perundang-undangan	Ya	Ya	Ya	110.200.000				
3.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Ya	1.1.	Membudayakan Masyarakat	Ya	80				Ya	Regulasi dan internalisasi Peraturan Perundang-undangan	Ya	Ya	Ya	1.000.000				
					Ya	80				Ya	Regulasi dan internalisasi Peraturan Perundang-undangan	Ya	Ya	Ya	111.000.000				
					Ya	80				Ya	Regulasi dan internalisasi Peraturan Perundang-undangan	Ya	Ya	Ya	10.000.000				
					Ya	80				Ya	Regulasi dan internalisasi Peraturan Perundang-undangan	Ya	Ya	Ya	1.000.000				
4.	Meningkatnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Ya	1.1.	Membudayakan etos kerja ASN (KPI/SMART)	Ya	80				Ya	Regulasi dan internalisasi Peraturan Perundang-undangan	Ya	Ya	Ya	1.000.000				
					Ya	80				Ya	Regulasi dan internalisasi Peraturan Perundang-undangan	Ya	Ya	Ya	100.000.000				
					Ya	80				Ya	Regulasi dan internalisasi Peraturan Perundang-undangan	Ya	Ya	Ya	1.000.000				
					Ya	80				Ya	Regulasi dan internalisasi Peraturan Perundang-undangan	Ya	Ya	Ya	1.000.000				
5.	Meningkatnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Ya	1.1.	Membudayakan etos kerja ASN (KPI/SMART)	Ya	80	Ya	Regulasi dan internalisasi Peraturan Perundang-undangan	Ya	Ya	Ya	1.000.000							
					Ya	80	Ya	Regulasi dan internalisasi Peraturan Perundang-undangan	Ya	Ya	Ya	100.000.000							
					Ya	80	Ya	Regulasi dan internalisasi Peraturan Perundang-undangan	Ya	Ya	Ya	1.000.000							
					Ya	80	Ya	Regulasi dan internalisasi Peraturan Perundang-undangan	Ya	Ya	Ya	1.000.000							

	SIKIP		INDIKATOR	skor	PROGRAM	SASARAN	REKUITAS	SASARAN	ANGGARAN Rp	
5. Meningkatkan ratio pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	Ya	5.1	Rasio pegawai Pengawasan Tinggi dan Menengah Dasar (PNS) tidak terancam pensiun dini	Ya	Perencanaan Pelaksanaan Mutasi dan promosi ASN Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	Ya	Tetapannya Pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN	Sebuah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi dan Promosi Pegawai Tinggi, Menengah Atas dan Menengah Bawah dan Mutasi ASN Jaring Dampak	Ya	15.800.000
	Ya	5.2	Rasio pegawai Pengawasan (PNS) tidak terancam pensiun dini sebagai keefektifan	Ya	Perencanaan Pelaksanaan Mutasi dan promosi ASN Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	Ya	Tetapannya Pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN	Sebuah Pengiriman Analisa Pegawai ASN	Ya	84.733.000
	Ya	5.3	Rasio jabatan fungsional Pemerintah Kabupaten (PNS) tidak terancam pensiun dini sebagai keefektifan	Ya	Perencanaan Pelaksanaan Mutasi dan promosi ASN Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	Ya	Tetapannya Pelaksanaan Promosi dan Mutasi ASN	Sebuah Dokumen Pelaksanaan Assessment Career	Ya	727.862.000
	Ya	5.3	Rasio jabatan fungsional Pemerintah Kabupaten (PNS) tidak terancam pensiun dini sebagai keefektifan	Ya	Perencanaan Pelaksanaan Mutasi dan promosi ASN Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	Ya	Tetapannya Pelaksanaan Pendidikan Lanjutan ASN	Sebuah ASN yang Menamatkan Pendidikan Lanjutan	Ya	252.800.000
Jumlah									Rp4.967.993.101	Rp0

Korontalo, 30 Oktober 2022
 Disusun Oleh :
 Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan SDM Daerah
 Kabupaten Morowali Utara

 ING. HARMONO ADON TANDI, M. SI
 NIP. 19670320 198703 1 866

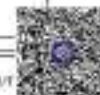


PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
SKPD : 5-03.5-04.0-00.01 Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Unit Organisasi : 5-03.5-04.0-00.01.000 Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5-03.5-04.0-00.01.000.000 Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
5	BELANJA	9.663.793.312,00	9.197.714.591,00	95,18	5.943.176.322,00
5.1	BELANJA OPERASI	9.234.661.368,00	8.766.171.492,00	94,94	5.861.257.438,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.921.347.488,00	3.835.665.037,00	97,81	3.166.260.132,00
5.1.02	Belanja Barang	5.313.313.870,00	4.930.506.455,00	92,85	2.675.007.306,00
5.2	BELANJA MODAL	429.131.944,00	428.543.099,00	99,86	81.918.884,00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	429.131.944,00	428.543.099,00	99,86	81.918.884,00
	SURPLUS / DEFISIT	(9.663.793.312,00)	(9.197.714.591,00)	0	(5.943.176.322,00)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(9.663.793.312,00)	(9.197.714.591,00)	0	(5.943.176.322,00)





PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Kompleks Perkantoran Jln. Bumi Nangka Telp/Fax (0465) 21095 Kolonodale Kode Pos 94971

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. NIMROD ADON TANDI, M.Si.

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : DR.dr. DELIS JULKARSON HEHI, M.A.R.S.

Jabatan : Bupati Morowali Utara

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kolonodale, 07 Maret 2022



DR.dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS



Drs. NIMROD ADON TANDI, M.Si.

Pendidik : Pembina Utama Muda
NIP. 19670720 198703 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang efektif dan efisien	Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	75 %
		Persentase Pegawai yang berpendidikan S1, S2, dan S3	68,19 %
		Persentase Kesesuaian Penempatan PNS dalam Jabatan sesuai Kompetensi dan Kualifikasi	65 %
		Persentase Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	0,20 %
		Persentase Penilaian Kinerja Pegawai yang bernilai sangat baik (%)	5,40 %
		Persentase Penerapan Sanksi Pelanggaran Disiplin	75 %
		Persentase PNS yang mengikuti diklat sesuai kompetensi	3,50 %
		Persentase PNS yang bersertifikat kompetensi (kecuali Guru dan Tenaga Kesehatan)	0,20 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.206.316.353,00	APBD
2. Program Kepegawaian Daerah	Rp. 1.492.986.155,00	APBD
Jumlah	Rp. 8.699.302.508,00	APBD

Kolonodale, 07 Maret 2022

Pihak Kedua,
BUPATI MOROWALI UTARA,

Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH,

Drs. NIMROD ADON TANDI, M.Si.
Rangkap: Pembina Utama Muda
NIP. 19670720 198703 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Kompleks Perkantoran Jln. Bumi Nangka Telp/Fax (0465) 21095 Kolonodale Kode Pos 94971

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. NIMROD ADON TANDI, M.Si.

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : DR.dr. DELIS JULKARSON HEHI, M.A.R.S.

Jabatan : Bupati Morowali Utara

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kolonodale, 20 Juli 2022



Pihak Kedua,
BUPATI MOROWALI UTARA,

DR. dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS



Pihak Pertama,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM DAERAH

Drs. NIMROD ADON TANDI, M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670720 198703 1 006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai LPPD	>80-90 A (Memuaskan)
		Indeks RB	>60-70 B (Baik)
		Indeks Profesional ASN	61 – 70 (Rendah)

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.206.316.353,00	APBD
2. Program Kepegawaian Daerah	Rp. 1.492.986.155,00	APBD
Jumlah	Rp. 8.699.302.508,00	APBD

Kolonodale, 20 Juli 2022

Pihak Kedua,
BUPA MOROWALI UTARA,



Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUM DAERAH,



Drs. NIMROD ADON TANDI, M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670720 198703 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Kompleks Perkantoran Jln. Bumi Nangka Telp/Fax (0465) 21095 Kolonodale Kode Pos 94971

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEDUA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. NIMROD ADON TANDI, M.Si.

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : DR.dr. DELIS JULKARSON HEHI, M.A.R.S.

Jabatan : Bupati Morowali Utara

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kolonodale, 30 Oktober 2022



Pihak Kedua,
BUPATI MOROWALI UTARA,

DR.dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS



Pihak Pertama,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM DAERAH

Drs. NIMROD ADON TANDI, M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670720 198703 1 006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEDUA TAHUN 2022
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase tingkat capaian kinerja BKPSDMD	≥ 92 %
2.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat	70
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	65 %
3.	Meningkatnya pengelolaan anggaran BKPSDMD	Persentase tingkat penyerapan anggaran BKPSDMD	≥ 85 %
		Pengelolaan Anggaran BKPSDMD bebas temuan BPK	0 Temuan
4.	Meningkatnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas ASN meningkat dibanding tahun sebelumnya	40
5.	Meningkatnya rasio pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	Rasio pegawai Perguruan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	210
		Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	15
		Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	35

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.845.467.063,00	APBD PERUBAHAN
2. Program Kepegawaian Daerah	Rp. 1.818.326.248,00	APBD PERUBAHAN
Jumlah	Rp. 9.663.793.312,00	APBD PERUBAHAN

Kolondale, 30 Oktober 2022

Pihak Kedua,
BUPATI MOROWALI UTARA,



DR. dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH,



Des. NIMROD ADON TANDI, M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670720 198703 1 006



Komplek Perkantoran Bupati Morowali Utara
Jalan Bumi Nangka, Kelurahan Kolonodale, Kecamatan Petasia,
Kolonodale - 94971

Website: <http://bkpsdm.morowaliutarakab.go.id>
email : bkpsdmdmorowaliutara@gmail.com

FB : Bkpsdmd Morowali Utara Instagram : @bkpsdmd_morut